

PEMILU

Sleman dan Bantul Paling Tinggi

JOGJA -- Pada pemilu legislatif (pileg) 2014 lalu, dua kabupaten di DIY, Sleman dan Bantul, mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi di antara daerah lainnya. Di Kabupaten Bantul angka partisipasi pemilih mencapai 81,2 persen dan di Sleman tingkat partisipasi ada di kisaran 81,4 persen.

Dalam sebuah riset yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY bekerjasama dengan UGM dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tingginya tingkat partisipasi itu ternyata dipengaruhi beberapa hal. Salah satunya adalah pandangan mencoblos saat pemilu merupakan kewajiban dan bukan hak.

"Seperti di Bantul misalnya, dari penelitian ini terungkap kalau masyarakat yang tidak mencoblos dianggap 'ora umum'. Terlebih lagi jika kita tarik ke belakang, dulu di zaman Orde Baru, orang yang tidak menggunakan hak pilihnya akan susah hidupnya karena dicari-cari aparat," ujar Bambang Eka Cipta Widodo salah satu pemapar hasil penelitian.

Dirinya menilai, meski berefek positif, namun pandangan masyarakat yang memilih karena suatu kewajiban bukan hak, menjadikan pilihan politik yang dihasilkan kurang berkualitas. Terkadang, sebut Bambang, pemilih hanya menggugurkan kewajiban saja, tanpa harus meneliti terlebih dulu siapa calon yang akan dipilih beserta rekam jejaknya. "Kalau dari segi kuantitas hasilnya baik, tapi dari sisi kualitas, pilihan yang di jatuhkan bisa dipertanyakan," sebutnya.

Bambang yang merupakan mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan juga dosen Jurusan Ilmu Politik UMY itu menuturkan ada beberapa faktor lain yang mengangkat tingkat partisipasi pemilih.

>> KE HAL 15

Sleman dan Bantul

Sambungan dari halaman 9

Misalnya stimulus partisipasi lewat praktik money politics. "Ada juga pragmatisme politik masyarakat yang terkoordinasi baik oleh lembaga RT/Dukuh yang menyebabkan terjadinya mobilisasi pemilih. Contohnya memilih calon A dari partai B kemudian di mobilisasi besar-besaran," katanya, Kamis (3/9) kemarin, di KPU DIY.

Sebaliknya yang menghambat partisipasi pemilih seperti kejenuhan masyarakat dan pandangan bahwa pemilu tidak akan merubah keadaan. "Ada juga yang memandang ikut pemilu itu tidak ada manfaat langsungnya, jadi lebih baik bekerja," tutur dia.

Hal terbalik terjadi di Kota Jogja yang diprediksi tingkat melek (literasi) politiknya cukup tinggi. Dalam pileg kemarin, tingkat partisipasi pemilih di Kota Jogja bahkan lebih rendah dibandingkan Bantul dan Sleman. Hasil penelitian Institute Research and Empowerment (IRE) menyebutkan, tingkat partisipasi ini juga terjadi saat pilkada, tak

hanya di saat pilpres dan pileg. "Meski tingkat literasi tinggi, tapi ternyata tingkat partisipasinya malah rendah. Kami tidak hanya melihat partisipasi pada tahap akhir saja, tapi di semua tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat problem tersebut," sebut Dina Mariana, peneliti IRE.

Dari penelitian IRE ada beberapa catatan tentang rendahnya partisipasi. Pertama pada tahap pemutakhiran data, masyarakat Kota Jogja dianggap kurang merespon, meskipun KPU Kota Jogja telah melakukan sosialisasi secara masif.

Dina menambahkan, IRE melihat rendahnya partisipasi masyarakat Kota Jogja karena kesempatan pemilih ikut terlibat dalam proses penentuan calon legislatif (caleg) masih sangat tertutup. Parpol masih belum transparan mengenai penentuan calon. "Imbasnya, masyarakat merasa tidak mengenal calon yang akan maju dalam pemilihan sehingga pemilih menjadi ragu," tandasnya saat pemaparan hasil penelitian di KPU Kota Jogja. (ros)